

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2011-2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBANA
JL. Surapati Nomor 1 Negara Telp (0365) 41210 Fax (0365) 41010

TAHUN 2012



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M. PAN/5/20007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama, untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dipandang perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016

Pasal 1

Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah beserta masing-masing Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Jembrana diberikan tugas :

- a. melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana setiap tahun; dan
- b. minimal 3 (tiga) bulan sekali, melakukan pemantauan capaian kinerja masing-masing kegiatan pada SKPD.

Pasal 4

Pasal 4

Naskah Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 5 Desember 2012
Bupati Jemberana



I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,



GEDE GUNADNYA

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011-2016

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Tugas : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Fungsi :
 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

4. Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Uraian Indikator	Alasan	Penanggungjawab	Satuan	Sumber Data
a.	Pendidikan					
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan bidang pendidikan	Jumlah kebijakan bidang pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan	Dinas Dikmudoraparbud	bh	
2.	Meningkatnya APK Pendidikan - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK	Persentase peningkatan APK Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya APM Pendidikan - SD/MI - SMP/MTS - SMA/SMK	Persentase peningkatan APM Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Rata-rata Nilai UAN Pendidikan	Rata-rata Nilai UAN Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu		nilai	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya sekolah yang melaksanakan MPMBS	Banyaknya sekolah yang melaksanakan MPMBS	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan efisiensi		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Meningkatnya Prosentase lulusan terserap tenaga kerja	Prosentase lulusan terserap tenaga kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan relevansi		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Meningkatnya	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan relevansi ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
8	Meningkatnya Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
9	Meningkatnya Rasio ketersediaan sekolah SMA	Rasio ketersediaan sekolah SMA	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan ketersediaan sekolah SMA		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
10	Meningkatnya Rasio guru: murid.SD/MI	Rasio guru: murid.SD/MI	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan layanan pada SD/MI		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
11	Meningkatnya Rasio guru: murid.SMA/MA	Rasio guru: murid.SMA/MA	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan layanan sekolah SMA/MA		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
12	Meningkatnya Rasio guru: murid.per	Rasio guru: murid.per kelas rata-rata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		rasio	Jembrana Dalam

	kelas rata-rata SD/MI	SD/MI	pendidikan terkait dengan guru SD/MI			Angka/BPS
13	Meningkatnya Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan ketersediaan guru SMP/MTs		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
14	Meningkatnya Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan ketersediaan guru SMA/SMA		rasio	Jembrana Dalam Angka/BPS
15	Meningkatnya Rata-rata Lama sekolah	Rata-rata Lama sekolah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan Lama sekolah		tahun	Jembrana Dalam Angka/BPS
b.	Kesehatan					
1	Jumlah kebijakan bidang kesehatan	Jumlah kebijakan bidang kesehatan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan	Dinas Kesehatan		
2	Meningkatnya Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000	Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan Posyandu		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan rumah sakit		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan dokter		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Meningkatnya Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan ketersediaan Tenaga Medis		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Meningkatnya Cakupan pertolongan persalihan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebinanan	Cakupan pertolongan persalihan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebinanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan pertolongan persalihan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebinanan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
8	Meningkatnya Cakupan desa/ kelurahan UCI	Cakupan desa/ kelurahan UCI	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan pelaksanaan desa/ kelurahan UCI		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
9	Meningkatnya Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan perawatan Balita Gizi buruk		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

10	Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
11	Meningkatnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan layanan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
12	Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan layanan rujukan pasien masyarakat miskin		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
13	Meningkatnya Cakupan kunjungan bayi	Cakupan kunjungan bayi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan layanan bayi		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
14	Meningkatnya umur arapan hidup	Angka umur Harapan hidup	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan kemampuan meningkatkan umur harapan hidup		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
c.	Pekerjaan Umum			Dinas PU		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan bidang Pekerjaan Umum	Jumlah kebijakan bidang Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya ketersediaan fasum yang terbangun	Persentase ketersediaan fasum yang terbangun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan fasum		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Panjang jalan yang baik	Rasio panjang jalan yang baik terhadap total panjang jalan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jalan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Panjang jembatan yang baik	Rasio panjang jembatan yang baik terhadap total panjang jembatan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan ketersediaan jembatan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya ketersediaan daerah irigasi dan bangunan –bangunan pelengkap lainnya	Rasio ketersediaan Irigasi yang baik terhadap total ketersediaan Irigasi Rasio ketersediaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya yang baik terhadap total ketersediaan daerah irigasi dan bangunan pelengkap lainnya.	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan irigasi		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Meningkatnya ketersediaan talud/bronjong	Rasio ketersediaan talud/bronjong yang baik terhadap total ketersediaan talud/bronjong	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan ketersediaan talud/bronjong		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi	Rasio rumah tinggal bersanitasi terhadap	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		%	Jembrana Dalam

		total rumah tinggal	Pekerjaan Umum terkait dengan sanitasi rumah tinggal			Angka/BPS
d	Perumahan			Dinas PU		
1	Meningkatnya ketersediaan Jumlah kebijakan dalam urusan perumahan	Jumlah kebijakan dalam urusan perumahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan terkait dengan ketersediaan regulasi di bidang perumahan		buah	
2	Meningkatnya Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan ketersediaan terkait dengan Rumah tangga pengguna air bersih		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Persentase Rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan terkait dengan ketersediaan Rumah tangga pengguna listrik		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Persentase Rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan terkait dengan ketersediaan Rumah layak huni		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
e	Tata ruang			Dinas PU/Bappeda dan PM		
1	Meningkatnya ketersediaan Jumlah kebijakan dalam urusan tata Ruang	Jumlah kebijakan dalam urusan tata Ruang	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang		bh	Dinas PU/Bappeda dan PM
2	Meningkatnya Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan penyiapan ruang terbuka Hijau	Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan	%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan penyiapan data bangunan ber-IMB	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Bappeda dan PM	%	Jembrana Dalam Angka/BPS
f.	Perencanaan Pembangunan			Bappeda dan PM		
1.	Meningkatnya ketersediaan Jumlah kebijakan dalam urusan Perencanaan Pembangunan	Jumlah kebijakan dalam urusan Perencanaan Pembangunan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan		bh	Bappeda dan PM
2.	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan penyiapan dokumen perencanaan.		%	Bappeda dan PM
3.	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah ketersediaan dokumen	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		Bah	Bappeda dan PM

	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Perencanaan Pembangunan terkait dengan penyiapan dokumen RPJPD.			
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Jumlah ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan penyiapan dokumen RPJMD.		buah	Bappeda dan PM
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Jumlah ketersediaan Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan penyiapan dokumen RKPd		buah	Bappeda dan PM
6	Meningkatnya Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd		%	Bappeda dan PM
g.	Perhubungan			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
1	Meningkatnya ketersediaan Jumlah kebijakan dalam urusan perhubungan	Jumlah kebijakan dalam urusan perhubungan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya ketersediaan Jumlah marka jalan dibuat	Jumlah marka jalan dibuat	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan pembuatan marka jalan		m2	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Persentase Arus penumpang angkutan umum	Persentase Arus penumpang angkutan umum	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan layanan arus penumpang		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Rasio Ijin trayek	Rasio Ijin trayek	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan layanan ijin trayek		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya Jumlah uji kir angkutan umum (kali)	Jumlah uji kir angkutan umum (kali)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan uji kir angkutan umum		Buah	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Meningkatnya Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan layanan Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis		unit	Jembrana Dalam Angka/BPS

h.	Lingkungan Hidup			Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan		
1	Meningkatnya ketersediaan Jumlah kebijakan dalam urusan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan dalam urusan Lingkungan Hidup	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup		bh	Kantor Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya frekuensi sosialisasi tentang persampahan	Banyak sosialisasi tentang persampahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan sosialisasi tentang persampahan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Jumlah taman kota yang ditata	Jumlah taman kota ditata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penataan taman kota		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Persentase penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penanganan sampah		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya Pengelolaan kualitas air (% penetapan kelas air)	Pengelolaan kualitas air (% penetapan kelas air)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan Pengelolaan kualitas air		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Meningkatnya Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penataan taman kota		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Meningkatnya Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penyediaan Tempat pembuangan sampah (TPS)		Bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
8	Meningkatnya Frekuensi Penegakan hukum lingkungan	Frekuensi Penegakan hukum lingkungan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penegakan hokum lingkungan		kali	Jembrana Dalam Angka/BPS
i.	Pertanahan			Bagian Pemerintahan		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan pertanahan	Jumlah kebijakan dalam urusan pertanahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pertanahan		bh	Tata Pemerintahan
2	Meningkatnya Jumlah aset tersertifikatkan	Jumlah aset tersertifikatkan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pertanahan terkait dengan sertifikasi aset		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS

j.	Kependudukan dan Catatan Sipil			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Jumlah penduduk yang memiliki akta cacatan sipil	Jumlah penduduk yang memiliki akta cacatan sipil	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan kepemilikan akta		or	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Persentase kepemilikan KTP	Persentase kepemilikan KTP	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan kepemilikan KTP		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan kepemilikan akta kelahiran		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
k	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			Kantor PPKB		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Menurunnya Rasio KDRT	Rasio KDRT	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan penanganan KDRT		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Menurunnya Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan penanganan tenaga kerja dibawah umur		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

I.	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera			Kantor PPKB		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Jumlah kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Menurunnya Rata – rata jumlah anak per keluarga	Rata – rata jumlah anak per keluarga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terkait dengan layanan KB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Rasio akseptor KB	Rasio akseptor KB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terkait dengan layanan KB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB aktif	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terkait dengan layanan KB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera terkait dengan layanan KB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
m.	Sosial			Dinas Kesejahteraan sosial tenaga Kerja dan transmigrasi		
A.	SOSIAL					
1.	Meningkatnya jumlah kebijakan dam urusan sosial	Jumlah kebijakan dalam urusan sosial	Mengukur kinerja oraganisasi dalam urusan sosial		bh	Jembrana Dalam angka/ BPS
2.	Meningkatnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Mengukur kinerja organisasi dalam terkait penanganan sarana sosial.		%	Jembrana dalam angka/ BPS
3.	Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan sosial terkait penanganan PMKS		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
4.	Meningkatnya persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan sosial terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial		%	Jembrana Dalam angka/ BPS

n	Tenaga Kerja			Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Tenaga Kerja	Jumlah kebijakan dalam urusan Tenaga Kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Angka partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja terkait dengan partisipasi angkatan kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Angka Angkatan Kerja	Angka Angkatan Kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja terkait dengan Angkatan Kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Angka Kesempatan Kerja	Angka Kesempatan Kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja Kesempatan Kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Menurunnya Pengangguran	Pengangguran	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja penurunan pengangguran		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
6	Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja sengketa pengusaha pekerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Meningkatnya Pencari kerja yang ditempatkan (%)	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
8	Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja terkait dengan pengangguran terbuka		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
9	Meningkatnya Keselamatan dan perlindungan	Keselamatan dan perlindungan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
10	Menurunnya Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
o.	Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah			Dinas Perindagkop		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Jumlah kebijakan dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Jumlah koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terkait dengan kesehatan koperasi		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		%	Jembrana Dalam

			Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terkait dengan keaktifan koperasi			Angka/BPS
4.	Meningkatnya Jumlah Usaha mikro dan kecil	Usaha mikro dan kecil	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terkait dengan Usaha mikro dan kecil		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
p.	Penanaman Modal			Bappeda dan PM		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan dalam urusan Penanaman Modal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Jumlah potensi investasi yang terekspos tingkat nasional	Jumlah potensi investasi yang terekspos tingkat nasional	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan ekspos potensi investasi		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Tersentandarisasinya Lama proses perizinan	Lama proses perizinan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan Lama proses perizinan	Kantor Pelayanan Perijinan terpadu	Hari	
4.	Meningkatnya Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan Perda yang mendukung iklim usaha		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
q	Kebudayaan			Dinas Dikmudoraparbud		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kebudayaan	Jumlah kebijakan dalam urusan Kebudayaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Jumlah aset budaya terdata	Jumlah aset budaya terdata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait dengan pendataan aset budaya		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni budaya	Penyelenggaraan festival seni budaya	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait dengan penyelenggaraan festival seni budaya		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Jlh sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jlh sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait sarana penyelenggaraan seni dan budaya		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meningkatnya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait dengan pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

r.	Pemuda dan Olahraga			Dinas Dikmudoraparbud		
1.	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kebijakan dalam urusan Pemuda dan Olahraga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2.	Meningkatnya Jumlah pemuda putus sekolah yang terbina	Jumlah pemuda putus sekolah yang terbina	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda		or	Jembrana Dalam Angka/BPS
3.	Meningkatnya Jumlah kejuaraan yang dimenangkan minimal tingkat provinsi	Jumlah kejuaraan yang dimenangkan minimal tingkat provinsi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya Jumlah Klub Olah raga	Jumlah Klub Olah raga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
5.	Meningkatnya Jumlah Gedung Olah Raga	Jumlah Gedung Olah Raga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
6.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7.	Meningkatnya Jumlah Organisasi Olah raga	Jumlah Organisasi Olah raga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
8.	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
9.	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Olah raga	Jumlah Kegiatan Olah raga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
s.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terkait		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

			dengan pembinaan politik daerah			
3	Meningkatnya Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terkait dengan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
t.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian					
	Meningkatnya rasio Pegawai yang memenuhi kualifikasi pendidikan	Jumlah kebijakan dalam sub urusan Kepegawaian	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan Kepegawaian terkait dengan rasio pegawai yang memenuhi persyaratan	BKD	%	Jembrana Dalam Angka/BPS
1	Meningkatnya rasio Pegawai yang berpenedidion S-1/Akta IV terhad total PNS	Jumlah kebijakan dalam sub urusan Kepegawaian terkait penyiapan Pegawai yang berpenedidion S-1/Akta IV terhad total PNS	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan Kepegawaian	BKD	%	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Jumlah kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Setda	bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian terkait dengan ketersediaan Pol-PP	Kantor Sat Pol PP	orang	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian terkait dengan ketersediaan Linmas	Kantor Sat Pol PP	orang	Jembrana Dalam Angka/BPS
5	Meninkatnya Frekwensi penanganan unjuk rasa	Frekwensi penanganan unjuk rasa	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Penanganan unjuk rasa	Kantor Sat Pol PP	Kali	Jembrana Dalam Angka/BPS

6	Meningkatnya Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian terkait dengan pengamanan wilayah	Kantor Sat Pol PP	Kali	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Menurunnya Kemiskinan	Kemiskinan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian terkait dengan penanggulangan kemiskinan	BPMPD	%	Jembrana Dalam Angka/BPS
8	Meningkatnya permohonan/ pencari izin serta infomasi pelayanan perizinan	Jumlah pencari/ permohonan izin	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pelayanan perizinan terkait dengan permohonan izin	Kantor Perijinan Terpadu	%	KPPT
9	Meningkatnya frekuensi Penegakan Perda	Penegakan Perda	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian terkait dengan Penegakan Perda	Sat Pol PP	Berkas	Jembrana Dalam Angka/BPS
				DINAS PENDAPATAN		
1.	Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD	Jumlah regulasi pengelolaan PAD	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan regulasi pengelolaan PAD	Dispenda	bh	Dispenda/ statistik
2.	Meningkatnya potensi pajak daerah yang tergali	Persentase potensi pajak yang tergali terhadap potensi yang tersedia	Mengukur kinerja organisasi dalam menggali potensi pajak	Dispenda	%	Dispenda/ statistik
3.	Meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Rasio PAD sektor Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan PAD dari sector Pajak Daerah	Dispenda	%	Dispenda/ statistik
4.	Meningkatnya rasio PAD dari NON Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah.	Rasio PAD Non pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan PAD dari sector Non Pajak Daerah	Dispenda	%	Dispenda/ statistik
5.	Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah	Rasio wajib pajak membayar pajak terhadap keseluruhan wajib pajak	Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Dispenda	%	Dispenda/ statistik

				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
t.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah< Kepegawaian dan Persandian					
1.	Meningkatnya jumlah kebijakan dalam sub urusan kepegawaian	Jumlah kebijakan dalam sub urusan kepegawaian	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan kepegawaian	BKD	Buah	Sekretariat BKD
2.	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kompetensi per jumlah pegawai seluruhnya	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan kepegawaian berdasarkan kompetensinya	BKD	%	Bidang diklat BKD
3.	Meningkatnya jumlah pejabat fungsional	Jumlah Pejabat fungsional terhadap total pegawai	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan kepegawaian berdasarkan fungsionalnya	BKD	%	Bidang pengembangan BKD
4.	Meningkatny penyediann modul sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)	Jumlah penyediaan modul SIMPEG	Mengukurnya kinerja organisasi dalam sub urusan kepegawaian berdasarkan panduan modul SIMPEG	BKD	Buah	Bidang mutasi dan data BKD
5.	Meningkatnya ratio pegawai yang berpendidikan S-1/ Akta IV, S-2, S-3 terhadap total PNS	Jumlah kebijakan dalam sub urusan kepegawaian terkait penyiapan pegawai berpendidikan S-1/ akata IV, S-2,S-3 terhadap total PNS	Mengukur kinerja organisasi dalam sub urusan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan	BKD	%	Bidang Pengembangan BKD
				INSPEKTORAT		
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Intenal	Mengukur Kinerja Pengawasan Internal	Inspektorat	Buah	Inspektorat
2	Meningknya tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasam	Mengukur kinerja tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan	Inspektorab	%	Inspektorat
3	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Naional	Mengukur kinerja organisasi peningkatan disiplin aparatur	Inspektorat	%	Inspektorat
4	Meningkatnya sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	Mengukur peningkatan sumber daya aparatur pemerintah	inspektorat	orang	inspektorat

				SEKRETARIAT DPRD		
1	Meningkatnya kualitas kearsipan	Jumlah arsip yang berkualitas	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip secara buku	Frekuensi Pengelolaan arsip secara buku	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan Pengelolaan arsip secara buku		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya jumlah pengelolaan kearsipan	Jumlah pengelolaan kearsipan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan pengunjung perpustakaan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4.	Meningkatnya program legislasi yang terselesaikan	Jumlah prolegda yang diselesaikan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi terkait dengan penyelesaian program legislasi daerah	Setwan	Buah	Setwan
5.	Meningkatnya pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat	Jumlah serapan aspirasi	Mengukur kinerja organisasi dalam penyerapan aspirasi	setwan	Buah	Setwan
7.	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota dewan	Jumlah dewan yang mengikuti pendidikan /bintek/ kunker/ konsultasi	Mengukur kinerja organisasi dalam peningkatan kapasitas dewan	Setwan	Kali	Setwan
8.	Meningkatnya rapat-rapat, konsultasi koordinasi	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat	Mengukur kinerja organisasi dalam memperlancar kegiatan rapat-rapat	Setwan	Kali	Setwan
u.	Ketahanan Pangan					BPMPD
1	Meningkatnya ketersediaan kebijakan dalam urusan Pangan	Jumlah kebijakan dalam urusan Pangan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan	BPMPD	bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait Ketersediaan pangan utama		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
v.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			BPMPD		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa terkait dengan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa terkait dengan kelompok binaan PKK		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

1.	Meningkatnya jumlah kebijakan dalam urusan tenaga kerja	Jumlah kebijakan dalam urusan tenaga kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja		bh	Jembrana Dalam angka/ BPS
2.	Meningkatnya angka partisipasi angkatan tenaga kerja	Angka Partisipasi angkatan kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja terkait dengan partisipasi angkatan kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
3.	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	Angka angkatan kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja terkait dengan partisipasi angkatan kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
4.	Meningkatnya angka kesempatan kerja	Angka kesempatan kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja dan kesempatan kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
5.	Menurunnya pengangguran	pengangguran	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja penurunan pengangguran		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
6.	Menurunnya angka sengketa pengusaha pekerja setahun	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja sengketa pengusaha kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
7.	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan (%)	Pencari kerja yang ditetapkan(%)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
8.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja terkait dengan pengangguran terbuka		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
9.	Meningkatnya keselamatan dan perlindungan	Keselamatan dan perlindungan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tenaga kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
10.	Menurunnya perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam perselisihan tenaga kerja		%	Jembrana Dalam angka/ BPS
w.	Statistik			Bappeda dan PM		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Statistik	Jumlah kebijakan dalam urusan Statistik	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik		bh	
2	Meningkatnya ketersediaan Buku "Kabupaten dalam angka"	Buku "Kabupaten dalam angka"	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik terkait dengan ketersediaan Buku "Kabupaten dalam angka"		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya ketersediaan Buku "PDRB Kabupaten"	Buku "PDRB Kabupaten"	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik terkait dengan ketersediaan Buku "PDRB Kabupaten"		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
x.	Kearsipan	Kearsipan		KPPAD		
1	Meningkatnya kualitas kearsipan	Jumlah arsip yang berkualitas	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip secara	Frekuensi Pengelolaan arsip secara	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		%	Jembrana Dalam

	buku	buku	Kearsipan terkait dengan Pengelolaan arsip secara buku			Angka/BPS
3	Meningkatnya jumlah pengelolaan kearsipan	Jumlah pengelolaan kearsipan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan pengunjung perpustakaan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
y.	Komunikasi dan Informatika			Dinas Hubkomimfo		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informasi	Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informasi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan jaringan komunikasi		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk	Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan wartel/warnet terhadap penduduk		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Jumlah surat kabar Nasional /lokal	Jumlah surat kabar Nasional /lokal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan ketersediaan surat kabar Nasional /lokal		%	Humas
5	Meningkatnya Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan penyiaran radio/TV lokal		%	Humas
6	Meningkatnya Konstan Webside milik pemerintah daerah	Webside milik pemerintah daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan Webside milik pemerintah daerah		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
7	Meningkatnya Pameran/Expo	Pameran/Expo	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan Pameran/Expo		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
z.	Perpustakaan			KPPAD		
1	Meningkatnya kualitas kearsipan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan		orang	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya kompetensi petugas perpustakaan	Jumlah petugas perpustakaan yang berkualitas	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan terkait dengan ketersediaan tenaga perpustakaan		orang	Jembrana Dalam Angka/BPS

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan perputakaan desa/ kelurahan	Jumlah kualitas pengelolaan perpustakaan desa/ kelurahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan terkait dengan Desa dan kelurahan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
aa. Pertanian						
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pertanian	Jumlah kebijakan dalam urusan Pertanian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian	Dinas KPK	bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait dengan Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Produktivitas Padi ton/Ha	Produktivitas Padi ton/Ha	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait dengan Produktivitas Padi ton/Ha		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Produktivitas Sayuran Ton/Ha)	Produktivitas Sayuran Ton/Ha)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait dengan Produktivitas Sayuran Ton/Ha)		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
bb. Kehutanan						
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kehutanan	Jumlah kebijakan dalam urusan Kehutanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan	Dinas Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Menurunnya Kerusakan kawasan hutan	Kerusakan kawasan hutan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait dengan Kerusakan kawasan hutan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Menurunnya Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)	Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait dengan pengelolaan hutan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
cc. Energi dan Sumberdaya mineral						
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Jumlah kebijakan dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Dinas PU	bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Menurunnya % Pertambangan tanpa izin/ Liar	% Pertambangan tanpa izin/ Liar	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral terkait dengan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

			Pertambangan tanpa izin/ Liar			
3	Meningkatnya % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral terkait dengan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
dd.	Pariwisata			Dinas Dikmudoraparbud		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pariwisata	Jumlah kebijakan dalam urusan Pariwisata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Kunjungan wisata	Kunjungan wisata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan Kunjungan wisata			Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			Jembrana Dalam Angka/BPS
ee.	Kelautan dan Perikanan			Dinas KPK		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kebijakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Jumlah produksi ikan	Jumlah produksi ikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan terkait dengan produksi ikan		ton	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya % Capaian target	% Capaian target	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan terkait dengan capaian kinerja target		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
4	Meningkatnya Jumlah rata-rata konsumsi ikan	Jumlah rata-rata konsumsi ikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan terkait dengan rata-rata konsumsi ikan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
ff.	Perdagangan			Dinas Perindagkop		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Perdagangan	Jumlah kebijakan dalam urusan Perdagangan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
	Meningkatnya % Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
	Meningkatnya Ekspor Bersih	Ekspor Bersih Perdagangan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan		%	Jembrana Dalam

	Perdagangan		perdagangan terkait Ekspor Bersih Perdagangan			Angka/BPS
gg.	Industri			Dinas Perindagkop		
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Industri	Jumlah kebijakan dalam urusan Industri	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industri		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industry terkait dengan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industry terkait dengan Pertumbuhan Industri secara keseluruhan		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
hh.	Ketransmigrasian			Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Ketransmigrasian	Jumlah kebijakan dalam urusan Ketransmigrasian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan ketransmigrasian		bh	Jembrana Dalam Angka/BPS
2	Meningkatnya Transmigrasi swakarsa	Transmigrasi swakarsa	Mengukur kinerja organisasi dalam layanan ketransmigrasian		%	Jembrana Dalam Angka/BPS
3	Meningkatnya Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan ketransmigrasian terkait dengan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		%	Jembrana Dalam Angka/BPS

BUPATI JEMBRANA,



I PUTU ARTHA